



## Karakteristik Petani dan Kontribusi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Terhadap Pendapatan Petani di Kulon Progo

*Characteristic of Farmer and Contribution of Community Forestry to Farmer's Income in Kulon Progo*

Indah Novita Dewi<sup>1\*</sup>, San Afri Awang<sup>2</sup>, Wahyu Andayani<sup>2</sup>, & Priyono Suryanto<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Balai Litbang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16, Makassar 90243

<sup>2</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Jl. Agro No. 1 Bulaksumur, Sleman 55281

\*Email: indahnovitadewi@yahoo.com

### HASIL PENELITIAN

Riwayat naskah:

Naskah masuk (*received*): 2 Januari 2017

Diterima (*accepted*): 22 Juni 2017

### KEYWORDS

*community forestry*

*CF contribution*

*farmer's income*

*socio-economics*

*Kulon Progo*

### ABSTRACT

*One of the project that is held by Ministry of Forestry is Community Forestry (CF), which one is located in Kulon Progo. This research aim was to obtain the social-economic characteristic of CF farmers in Kulon Progo and to know the contribution of CF to their total earning. The data collection had been held from November 2013 until February 2014 and was collected by survey and interview to some members of CF groups. The data was analyzed by descriptive qualitative method. The results showed that the average of farmer's age was 53; farmer's education was in a low level as 53% were graduated from elementary school. The average of family member were 4 persons. The average of CF land was 2.128 m<sup>2</sup> and the average of farmers's own land was 2.947 m<sup>2</sup>. That was meant that the farmer was near to be categorized as poor farmer. Seventy percent of farmers from production forest and 47.3% farmers from protected forest were categorized as very poor and poor. CF contribution towards farmer's income was 6.4% in production forest and 4.8% in protected forest. The low contribution of CF implicated to improve farmer's income through developing non-timber forest product as herbs and edible root and also potential for eco-tourism.*

### INTISARI

Salah satu program yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan terkait pemberdayaan masyarakat adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm), yang salah satunya berlokasi di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi petani HKm Kulon Progo dan kontribusi HKm terhadap pendapatan petani. Penelitian dilakukan mulai November 2013 sampai dengan Februari 2014. Data dikumpulkan melalui survei dan wawancara kepada anggota kelompok tani dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan petani HKm rata-rata berusia 53 tahun, pendidikan petani rendah karena 53% lulusan SD. Rata-rata jumlah

### KATA KUNCI

hutan kemasyarakatan

kontribusi HKm

pendapatan petani

sosial-ekonomi

Kulon Progo

tanggungan keluarga 4 orang. Rata-rata luas lahan andil 2.128 m<sup>2</sup> dan rata-rata luas lahan milik 2.947 m<sup>2</sup> sehingga termasuk petani gurem. Tujuh puluh persen petani HKm hutan produksi dan 47,3% petani HKm hutan lindung masuk ke dalam kategori miskin sekali dan miskin. Kontribusi HKm pada pendapatan petani adalah 6,4% pada hutan produksi dan 4,8% pada hutan lindung. Kecilnya kontribusi dari HKm berimplikasi pada upaya peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan potensi tanaman empon-empon dan umbi-umbian serta potensi wisata.

---

© Jurnal Ilmu Kehutanan-All rights reserved

---

## Pendahuluan

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan sangat penting, mengingat intensitas interaksi masyarakat sekitar hutan dengan hutan sangat tinggi di semua wilayah Indonesia (Wollenberg et al. 2004; Awang 2006; Aji et al. 2014; Ekawati et al. 2015), di samping itu petani sekitar hutan pada umumnya miskin dan berpendidikan rendah (Suyanto & Khususiyah 2006). Alasan utama masyarakat menggarap lahan hutan di sekitar tempat tinggal mereka adalah keterbatasan lahan garapan dan rendahnya pendapatan (Djamhuri 2008). Dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan sekitar hutan, pemerintah menyelenggarakan berbagai program kehutanan sosial. Kehutanan sosial merupakan suatu sistem pengelolaan hutan dengan dua elemen utama yakni partisipasi lokal dan peningkatan produktivitas secara lestari (Awang 2004).

Kehutanan sosial mulai dicetuskan dalam Kongres Kehutanan Internasional tahun 1978, sehingga kegiatan kehutanan sosial sudah berjalan di seluruh dunia selama empat dekade. Perspektif kehutanan sosial di Indonesia meliputi pengakuan pada inisiatif program pemerintah dan inisiatif masyarakat di tingkat lokal misalnya hutan rakyat di Jawa.

Salah satu bentuk kehutanan sosial inisiatif pemerintah adalah program Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah suatu program di mana masyarakat diberi hak kelola atas lahan hutan negara.

Petani HKm mengelola hutan negara dan mendapatkan manfaat dari program tersebut. HKm dapat dilaksanakan baik di hutan produksi maupun di hutan lindung. HKm diselenggarakan sebagai bentuk legalisasi dari praktik pemanfaatan hutan negara oleh masyarakat. Masyarakat yang awalnya mengelola lahan hutan secara ilegal (perambahan), ditertibkan dalam suatu organisasi pengelolaan hutan berupa kelompok tani hutan dan koperasi. Masyarakat dapat mengelola lahan hutan yang sudah bertahun-tahun dikelola, dan sebagian yang belum mengelola namun ingin turut berpartisipasi dalam program HKm, mendapatkan jatah lahan andil hutan melalui proses musyawarah bersama anggota kelompok (Sepsiaji & Fuadi 2004). Lahan andil merupakan lahan garapan petani di hutan negara.

Petani HKm berhak memperoleh manfaat dari hasil kayu yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan. Pada saat petani belum dapat memanfaatkan hasil kayu, petani menanam berbagai tanaman sela baik tanaman MPTS (*Multipurpose Tree Species*) maupun tanaman pangan di sela pohon kayu dan melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penerapan keterpaduan pohon dan tanaman pertanian dalam penyelenggaraan HKm dilakukan dengan menggunakan teknik agroforestry atau tumpangsari. Permasalahan timbul saat terjadi penurunan produktivitas tanaman pangan akibat sistem agroforestry yang diterapkan hanya dapat memberikan penghasilan maksimal di 2-3 tahun

pertama (Mustofa 2011) sehingga pendapatan petani menurun.

Beberapa penelitian tentang HKm melaporkan hasil bahwa hasil pertanian pangan yang dilaksanakan di lahan HKm hanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan subsisten (Maryudi et al. 2012). Petani kurang mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki (Nandini 2013) sehingga tidak ada nilai tambah dari produk kehutanan yang dihasilkan. Sementara di sisi lain, program HKm di tempat lain dengan komoditi yang berbeda merupakan sumber utama pendapatan masyarakat seperti pada masyarakat Punan di Kabupaten Malinau (Limberg et al. 2006). Petani HKm Sesaot di Lombok menanam kopi dan buah-buahan di sela tanaman kayu (Galudra et al. 2010). Jenis tanaman sela dominan pada HKm di desa Tanjung Alai, Riau, adalah karet, sungkai, durian, rambutan, kopi dan pinang (Rochmayanto & Sasmit 2005). HKm di Lampung lebih dominan dengan tanaman kopi, coklat dan buah-buahan (Sanudin et al. 2016). HKm di Gunungkidul mengusahakan tanaman palawija, rumput pakan ternak dan buah-buahan sebagai tanaman sela di antara tanaman kayu jati (Mulyadin et al. 2016).

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang hutan negaranya telah diinventarisasi dan identifikasi untuk dicadangkan sebagai areal HKm seluas 203 ha. Areal ini berada di wilayah RPH Kokap seluas 83 ha dan RPH Sermo seluas 120 ha. Areal HKm seluas 203 ha ini dikelola oleh 7 kelompok tani hutan yang membentuk 7 koperasi HKm. Dua dari kelompok tersebut mengelola hutan produksi dan lima lainnya mengelola hutan lindung. Sebagian besar areal HKm Kulon Progo berupa area perbukitan yang sangat penting untuk dijaga kelestariannya karena merupakan daerah resapan air (Palmolina 2014).

Kondisi lahan HKm Kulon Progo dengan tanaman pokok tanaman kayu rimba dan tanaman sela berupa palawija dan umbi-umbian, sudah mengalami penurunan produktivitas. Di sisi lain, ada

potensi jasa lingkungan yang mulai berkembang. Penelitian mengenai pengembangan wisata alam pada areal hutan sudah banyak diteliti (Hardika 2011; Kuuder et al. 2013; Auesriwong et al. 2015; Hasiholan 2015) dan masing-masing sesuai karakteristik daerahnya, mempunyai implikasi yang positif. Penurunan produktivitas lahan HKm dan potensi jasa lingkungan pada HKm Kulon Progo ini mendasari penulis untuk melakukan penelitian pada petani HKm Kulon Progo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik petani, pendapatan dan kontribusi HKm terhadap pendapatan. Informasi mengenai karakteristik petani terbagi menjadi karakter demografi, karakter sosial ekonomi maupun karakter sosial budaya (Agunggunanto 2011). Karakteristik demografi terbagi menjadi umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga (Afandi 2010; Budiartiningsih et al. 2010; Nurhasikin 2013; Andini et al. 2013; Manyamsari & Mujiburrahmad 2014); karakteristik sosial ekonomi antara lain adalah luas lahan garapan (Suratiah 2001) dan pendapatan; sedangkan karakteristik sosial budaya terdiri dari mata pencaharian petani (Mubyarto 1979; Saadah 1990) dan kelembagaan (Sanudin et al. 2016). Informasi mengenai karakteristik petani dapat memberikan keterangan kondisi petani dan potensi sumberdaya yang dapat dikembangkan. Penjelasan mengenai pendapatan dan kontribusi HKm dapat memberikan informasi mengenai berbagai permasalahan yang dialami petani. Hasil dari penelitian dapat digunakan untuk menganalisis apa yang perlu dilakukan untuk pengembangan HKm Kulon Progo ke depan.

## **Bahan dan Metode**

### **Lokasi dan waktu penelitian**

Penelitian dilaksanakan di lokasi HKm Kulon Progo, di dua kecamatan yaitu Kecamatan Kokap dan Kecamatan Pengasih. Pengumpulan data dilakukan selama tiga bulan (November 2013-Februari 2014).

## Unit analisis dan sampel penelitian

Unit analisis penelitian ini adalah petani yang tergabung dalam kelompok tani HKm Kulon Progo. Terdiri dari tujuh kelompok tani yang dapat dikelompokkan lagi menjadi dua sub kelompok. Pertama sub kelompok tani HKm hutan produksi (terdiri dari dua kelompok), dan kedua sub kelompok tani HKm hutan lindung (terdiri dari lima kelompok). Berdasarkan pedoman Storey dan Marzuki (2002), maka sampel yang diambil dari masing-masing sub populasi adalah 30 responden dari kelompok tani HKm hutan produksi dan 38 responden dari kelompok tani HKm hutan lindung sehingga total responden adalah 68 petani.

## Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan berupa data primer maupun sekunder. Data primer dikumpulkan dengan metode survei melalui bantuan kuesioner. Adapun data sekunder didapatkan dari berbagai instansi terkait.

## Analisis data

Beberapa analisis dilakukan dalam penelitian ini, antara lain:

- Analisis pendapatan: pendapatan petani dihitung dengan menjumlahkan pendapatan dari kegiatan pertanian, non pertanian, kegiatan HKm dan pendapatan lain-lain. Keseluruhan data pendapatan petani adalah pendapatan yang diperoleh dalam setahun terakhir.

$$P = PtP + PtNP + PHKm + PL$$

Keterangan:

P = Pendapatan

PtP = Pendapatan total pertanian

PtNP = Pendapatan total non pertanian

PHKm = Pendapatan kegiatan HKm

PL = Pendapatan lain-lain

Kontribusi pendapatan dari kegiatan HKm:

$$KHKm = (PHKm/P) \times 100\%$$

Keterangan:

KHKm = Kontribusi program HKm bagi pendapatan masyarakat

PHKm = Pendapatan dari kegiatan HKm

P = Pendapatan total rumah tangga selama setahun terakhir

- Analisis kemiskinan

Analisis tingkat kemiskinan petani menggunakan kriteria miskin dan tidak miskin (Sayogyo 1988). Cara penentuannya adalah membandingkan pendapatan/pengeluaran petani dengan harga beras di lokasi penelitian. Penambahan nilai sebesar 10% digunakan untuk nilai tukar beras, dengan asumsi bahwa kebutuhan saat ini telah mengalami peningkatan (Awang 1994).

- Analisis deskriptif kualitatif

Semua informasi terkait karakteristik petani dan hasil perhitungan pendapatan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

### Karakteristik petani

Karakteristik petani dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu karakter demografi, karakter sosial ekonomi dan karakter sosial budaya (Agunggunanto 2011). Variabel umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga termasuk dalam karakter demografi. Variabel luas lahan garapan dan pendapatan termasuk karakter sosial ekonomi. Variabel pekerjaan/matapencaharian petani dan kelembagaan termasuk dalam karakter sosial budaya. Karakteristik petani berupa umur, pendidikan formal, rata-rata jumlah anggota keluarga dan luas penguasaan lahan, dipaparkan pada Tabel 1.

### Umur

Umur petani HKm di Kulon Progo berkisar 31-76 tahun, dengan rata-rata umur 53 tahun. Manusia dikatakan produktif apabila memiliki usia 15-64 tahun (Nurhasikin 2013). Petani HKm Kulon Progo yang termasuk usia non produktif (>64 tahun) mencapai 13%. Bila dibandingkan antara HKm hutan produksi dan HKm hutan lindung, maka terlihat pada Tabel 1

**Tabel 1.** Karakteristik petani HKm Kulon Progo  
**Table 1.** Characteristics of farmer in Kulon Progo HKm

No	Uraian	HKm Hutan Produksi	HKm Hutan Lindung	Total
1.	Umur (%)			
	a. Produktif	70	97	87
	b. Tidak produktif	30	3	13
2.	Pendidikan formal (%)			
	a. Tidak lulus SD	17	8	12
	b. Setara SD	63	45	53
	c. Setara SLTP	10	18	15
	d. Setara SLTA	10	29	20
3.	Rata-rata jumlah anggota keluarga (orang)	4	4	4
4.	Luas penguasaan lahan milik (%)			
	a. 0-1000 m	40	29	33,8
	b. 1001-2500	20	31,6	26,5
	c. 2501-5000	23,3	26,3	25
	d. >5000	16,7	13,1	14,7
5.	Anggota yang mempunyai lahan garapan lain	4 orang	6 orang	10 orang
6.	Rata-rata luas andil HKm	2.150,7 m <sup>2</sup>	2.106,2 m <sup>2</sup>	2.128,5 m <sup>2</sup>

Keterangan: analisis data primer (2014)

Remarks: primary data analysis (2014)

bahwa petani dengan usia non produktif lebih banyak terdapat pada HKm hutan produksi. Banyaknya petani dengan usia non produktif (lansia), dikarenakan merasa masih kuat, harus bekerja untuk memperoleh penghasilan, dan tidak ada regenerasi petani. Anak-anak petani selepas sekolah formal, biasanya merantau ke luar daerah untuk mencari pengalaman alih-alih bekerja di bidang pertanian. Selain itu, sesuai penelitian Andini et al. (2013), petani masih bekerja di usia tua karena tidak memiliki jaminan hari tua (pensiun), sehingga harus terus bekerja selama tidak ada yang menjamin hidupnya.

#### *Tingkat pendidikan*

Pendidikan sangat menentukan tingkat kompetensi petani dalam melakukan kegiatan pertanian (Manyamsari & Mujiburrahmad 2014). Yang dimaksud dengan kompetensi adalah perwujudan perilaku dalam merencanakan kegiatan untuk mencapai target. Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani didominasi oleh SD (53%), SLTP (15%) dan SLTA (20%). Sisanya yaitu sebanyak 12% adalah mereka yang putus sekolah (SD, tapi tidak lulus). Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan petani relatif rendah seperti sudah diteliti

oleh Suyanto dan Khususiyah (2006). Pendidikan yang rendah, selain berimplikasi pada kurang terkoordinirnya perencanaan pertanian, juga akan berpengaruh pada jenis pekerjaan lain yang dapat dilakukan oleh petani dalam upaya peningkatan pendapatan. Pilihan pekerjaan menjadi terbatas pada sektor informal (Budiartiningih et al. 2010), misalnya menjadi buruh, atau istilah yang sering dipakai responden dalam penelitian ini adalah buruh serabutan. Buruh serabutan menerima semua kesempatan memburuh, baik itu sebagai buruh tani, buruh bangunan, buruh tukang kayu, buruh tukang batu ataupun sekadar membantu tetangga memperbaiki atap rumah dan pekerjaan kasar lainnya. Petani di HKm hutan lindung mempunyai pendidikan yang relatif lebih tinggi dari pada petani HKm hutan produksi. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong lebih berkembangnya kegiatan HKm di hutan lindung.

#### *Jumlah tanggungan keluarga*

Jumlah tanggungan keluarga petani berkisar antara 1-7 orang, dengan rata-rata jumlah tanggungan keluarga masing-masing petani adalah 4 orang. Jumlah tanggungan keluarga yang besar dapat

menjadi salah satu sebab sebuah rumah tangga menjadi miskin (Afandi 2010), terutama jika anggota keluarga mayoritas masih berusia non-produktif. Jumlah tanggungan keluarga empat orang tergolong sedang.

Komposisi dalam keluarga dengan jumlah tanggungan empat orang, bukan lagi bapak-ibu-dua anak. Banyak yang hanya tinggal berdua dengan istri, saudara, maupun cucu. Sebagian dari anak yang telah berkeluarga, berpisah dari rumah induk. Anak yang belum berkeluarga, keluar daerah untuk bekerja sebagai buruh. Implikasinya, pada sebagian keluarga petani, lahan garapan hanya diolah dengan tenaga kerja keluarga yang minimal.

#### *Luas lahan garapan*

Terdapat tiga jenis lahan garapan petani, yaitu lahan andil HKm, lahan milik (sawah, ladang, hutan rakyat dan pekarangan) serta lahan bukan milik (tanah kas desa, lahan sewa, lahan milik kerabat). Rata-rata luas lahan andil HKm yang digarap petani adalah 2.128,5m<sup>2</sup>. Lahan andil yang paling sempit adalah 250 m<sup>2</sup>; sedangkan yang terluas adalah 10.000 m<sup>2</sup>. Perbedaan luas lahan tersebut tidak menimbulkan kecemburuan antar penggarap. Hal ini dikarenakan pembagian lahan andil sudah melalui cara yang disepakati semua anggota. Lahan yang awalnya sudah digarap oleh seorang petani, tetap diberikan hak pengelolaannya pada petani tersebut. Lahan andil yang belum ada penggarapnya, dibagikan dengan cara diundi. Petani HKm juga dapat menentukan berapa luas lahan andil yang diinginkan sesuai kemampuan tenaga kerja yang dimiliki.

Luas lahan andil petani saat ini, merupakan luas lahan sejak awal pembagian lahan. Hanya beberapa yang mengalami perubahan, seperti kasus seorang petani yang awalnya menggarap lahan andil seluas 1.350 m<sup>2</sup>, namun kemudian bertambah 650 m<sup>2</sup> menjadi 2000 m<sup>2</sup>. Penambahan lahan tersebut adalah lahan andil dari kerabatnya yang meninggal. Hal ini sesuai aturan kelompok, bahwa lahan andil yang

penggarapnya meninggal dunia, akan dilanjutkan ke ahli warisnya dan tidak dapat dipindahtanggankan.

Luas lahan milik yang digarap oleh petani HKm bervariasi mulai dari 0 m<sup>2</sup> – 14.000 m<sup>2</sup> dengan rata-rata luas lahan garapan sebesar 2.947 m<sup>2</sup>. Rata-rata luas lahan milik yang kurang dari 0,5 ha menunjukkan bahwa sebagian petani HKm masuk dalam kategori petani kecil atau petani gurem (Suratiyah 2001). Petani yang luas lahan miliknya sama dengan nol/*landless* ataupun sangat sempit terbagi menjadi dua golongan. Golongan pertama menjadi sangat tergantung pada lahan andil HKm. Keahlian pada bidang lain yang terbatas membuat petani berusaha merekayasa lahan andilnya agar terus dapat ditanami tanaman pangan dengan hasil optimal, misalnya dengan pemupukan maupun pengurangan tajuk. Golongan kedua menjadi sangat tergantung pada pekerjaan di luar sektor pertanian/buruh. Pada umumnya lokasi andil HKm cukup jauh dari rumah dan kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk ditanami tanaman sela. Sebagian petani ada yang hanya sesekali menengok lahan andilnya, misalnya dengan frekuensi dua bulan sekali. Bahkan ada yang mengaku sudah satu tahun lebih tidak melihat lahan andilnya. Petani yang menggarap lahan lain hanya sebesar 13% dari total petani. Lahan yang digarap berupa lahan sewa, lahan kas desa, lahan milik kerabat maupun *maro* atau bagi hasil.

#### *Jenis pekerjaan*

Pekerjaan utama anggota kelompok tani HKm di Kulon Progo adalah sebagai petani, yang mencakup pertanian rakyat, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil hutan atau biasa disebut pertanian dalam arti luas (Mubyarto 1979). Selain bertani dan beternak, sebagian besar anggota HKm juga melakukan pekerjaan sebagai penderes atau menderes air nira kelapa untuk diolah menjadi gula jawa. Pekerjaan ini pada umumnya dilakukan secara kerjasama antara kepala rumah tangga dan istrinya. Tiap pagi dan sore, bapak akan menderes

kelapa dan ibu akan mengolah air nira menjadi gula kelapa.

Setiap pagi pekerjaan dimulai dengan menderes air nira, lalu mengarit atau mencari rumput untuk pakan ternak. Setelah memberi makan ternak, petani akan ke lahan masing-masing dan bekerja sesuai musimnya apakah menanam, menyiangi, atau memanen. Petani HKM hutan lindung beraktivitas di areal wisata sesuai tugas masing-masing karena ada areal wisata HKM yang telah berkembang (Kalibiru, Puncak Dipowono, dan Watu Gembel). Pada sore hari petani akan kembali mengarit dan menderes kelapa.

Pekerjaan di lahan pertanian tidak menuntut petani untuk setiap hari berada di lahan pertaniannya (Saadah 1990). Petani dapat memanfaatkan waktu luang dengan bekerja di sektor lain jika masih ingin menambah pendapatan. Pada petani HKM Kulon Progo, sebagian besar memanfaatkan waktu untuk bekerja di sektor informal menjadi buruh dan pedagang.

#### *Kelembagaan petani*

Kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari penguatan kelembagaan petani. Petani HKM tergabung dalam kelompok-kelompok tani yang dibentuk berdasarkan kedekatan areal lahan HKM. Tujuh kelompok HKM Kulon Progo sudah berbadan hukum koperasi yang merupakan syarat awal dari pengajuan IUPHKM. Pertemuan rutin antar anggota kelompok dilakukan dengan jadwal yang telah disepakati yaitu satu bulan sekali. Tujuh kelompok petani juga tergabung dalam satu paguyuban yang dinamakan Komunitas Lingkar (Komunitas Peduli Lingkungan Alam Lestari). Pertemuan Komunitas Lingkar biasanya dilakukan sebulan sekali dengan agenda yang lebih serius membahas berbagai perkembangan baru dalam pengelolaan HKM, dengan melibatkan wakil dari Dinas Kehutanan maupun LSM sebagai fasilitator/pendamping kelompok tani. Hasil pembahasan kemudian ditindaklanjuti di tingkat kelompok tani HKM. Pertemuan kelompok baik di

tingkat internal kelompok tani maupun antar kelompok di bawah komunitas Lingkar merupakan salah satu bentuk penguatan kelompok dalam memelihara kekompakan. Penguatan kelompok tani merupakan hal yang sangat penting karena merupakan salah satu kunci keberhasilan HKM (Sanudin et al. 2016). Hubungan kohesi sosial antara individu dalam kelompok maupun antar kelompok merupakan salah satu potensi yang dimiliki petani HKM Kulon Progo yang masih optimis mencapai keberhasilan dalam pengelolaan HKM.

#### **Pendapatan petani dan kontribusi HKM**

Total pendapatan petani HKM Kulon Progo berkisar antara Rp 2.540.000,-/tahun-Rp 36.325.000,-/tahun dengan rata-rata total pendapatan sebesar Rp 11.487.059,-/tahun seperti dipaparkan pada Tabel 2. Pendapatan total tersebut berasal dari penjumlahan pendapatan lahan andil, pendapatan pertanian, pendapatan non pertanian, dan pendapatan lain-lain (iriman dari saudara). Sumber pendapatan yang memberikan kontribusi terbesar adalah pendapatan pertanian (52,4%), diikuti oleh pendapatan non pertanian (33,6%), pendapatan lain-lain (8,6%) dan pendapatan HKM (5,4%). Perbandingan antara pendapatan petani HKM hutan produksi dan HKM hutan lindung ternyata menghasilkan distribusi persentase yang sama antar sumber pendapatan, dipaparkan pada Tabel 3.

Luas lahan HKM yang berbeda-beda antar petani ditambah dengan kondisi lahan yang berbeda-beda, mengakibatkan perbedaan kontribusi lahan HKM dari masing-masing petani terhadap pendapatan total. Persamaan dari masing-masing petani adalah terjadinya penurunan kontribusi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil lahan andil saat penelitian dilaksanakan, hanya sepertiga dari awal pembukaan lahan HKM.

Tabel 3 menunjukkan bahwa pendapatan terbesar dalam rumah tangga petani HKM Kulon Progo masih didominasi dengan pendapatan

pertanian dengan persentasi lebih dari 50% baik petani HKm Hutan Produksi maupun petani HKm Hutan Lindung. Pendapatan pertanian yang dimaksud di sini adalah seluruh hasil pertanian yang diperoleh petani dari lahan milik maupun lahan sewa ditambah dengan pendapatan ternak. Kontribusi kedua terbesar adalah dari pendapatan non pertanian yaitu pendapatan dari hasil memburuh, menukang maupun pekerjaan lainnya. Kontribusi berikutnya adalah pendapatan lain-lain, berupa kiriman dari saudara/kerabat.

Kegiatan HKm memberikan kontribusi yang paling rendah di antara keempat sumber pendapatan. Hal ini dikarenakan lahan sudah menurun produktivitasnya dalam menghasilkan tanaman pangan. Dengan kondisi lahan yang demikian maka terjadi penurunan pendapatan. Hal ini membuat petani HKm Kulon Progo memikirkan alternatif lain

dari pengembangan HKm dengan memaksimalkan potensi yang sudah ada. Salah satu potensi yang sudah dikembangkan adalah potensi wisata alam di tiga lokasi yaitu Kalibiru, Puncak Dipowono, dan Watu Gembel. Pada saat penelitian dilakukan, hanya Kalibiru yang sudah berkembang dengan baik. Sarana dan prasarana wisata didirikan dengan didanai oleh pemerintah daerah ditambah iuran swadana masyarakat. Pengembangan wisata di Kalibiru sudah memberikan hasil yang cukup besar namun belum dapat meningkatkan pendapatan petani. Sebagian besar hasil kegiatan wisata digunakan untuk membayar biaya operasional seperti listrik dan pemeliharaan sarana prasarana. Sebagian disisihkan untuk uang kas pada komunitas Lingkar sehingga walaupun kecil sebenarnya kegiatan ekowisata ini juga telah menyumbangkan kontribusi pada kelompok tani HKm.

**Tabel 2.** Luas lahan dan pendapatan petani HKm Kulon Progo  
**Table 2.** Total land area and income of farmer in HKm Kulon Progo

No	Luas andil	Luas Lahan milik	Luas Lahan lain	Pendapatan andil	Pendapatan pertanian	Pendapatan non pertanian	Pendapatan Lain-lain	Pendapatan Total
1	1500	8000		400.000	15.200.000	12.000.000	0	27.600.000
2	3000	3000	9500	2600000	5300000	0	600000	8500000
3	500	14000		200000	5900000	300000	0	6400000
4	2500	4750	2000	925000	4605000	300000	1200000	7030000
5	1000	800		705000	1160000	5040000	0	6905000
6	2500	2000		237500	3930000	0	0	4167500
7	2500	2000		187500	2600000	4800000	500000	8087500
8	6000	1300		1800000	4670000	0	950000	7420000
9	10000	5000		840000	10450000	0	500000	11790000
10	2500	7300		615000	8000000	1500000	2000000	12115000
11	3000	4500		412500	3500000	0	500000	4412500
12	1000	6000		125000	5000000	0	1000000	6125000
13	1000	1000		580000	2350000	0	500000	3430000
14	1000	1100	500	400000	6560000	5400000	0	12360000
15	2500	5000		300000	6970000	6000000	0	13270000
16	1500	700		512500	800000	4850000	240000	6402500
17	3000	700		1770000	2350000	0	1440000	5560000
18	3000	1000		925000	1000000	1500000	2400000	5825000
19	1500	0		0	1200000	9780000	5000000	15980000
20	500	0		250000	400000	3134000	0	3784000



Lanjutan Tabel 2

21	855	500		0	2380000	0	600000	2980000
22	2000	600		375000	900000	4800000	600000	6675000
23	1000	0	900	0	2550000	3600000	0	6150000
24	1500	5000		450000	1290000	300000	500000	2540000
25	1500	800		435000	1910000	3560000	1100000	7005000
26	375	0		0	100000	5760000	0	5860000
27	2000	10600	1000	1200000	24000000	6000000	0	31200000
28	1040	3600		300000	7800000	1440000	300000	9840000
29	3000	2400		720000	3830000	0	1200000	5750000
30	1250	2500		575000	12800000	6450000	0	19825000
31	1200	7200	1000	330000	9900000	4800000	0	15030000
32	5000	650		687500	7550000	2400000	300000	10937500
33	2500	2500		280000	1980000	3000000	1450000	6710000
34	1700	600		100000	900000	3600000	1200000	5800000
35	5000	400	8000	1800000	15250000	6000000	0	23050000
36	1400	9700		150000	9045000	0	0	9195000
37	1495	4210		843000	5576000	0	12000000	18419000
38	800	1815		0	7300000	0	0	7300000
39	1380	3200		540000	11820000	0	0	12360000
40	920	3480		0	7100000	0	0	7100000
41	2320	4400		707500	8150000	7680000	0	16537500
42	800	5000		600000	15360000	0	0	15960000
43	625	3600		325000	6000000	30000000	0	36325000
44	250	2600		375000	7560000	0	1920000	9855000
45	1200	800		500000	7020000	9600000	0	17120000
46	1200	1252		350000	4920000	9600000	0	14870000
47	960	1200		653000	25700000	3600000	0	29953000
48	1000	9000		500000	5800000	0	12000000	18300000
49	1560	6050		1350000	5300000	7200000	0	13850000
50	1225	2000		125000	4000000	10800000	0	14925000
51	1000	9000		150000	4730000	12000000	0	16880000
52	5000	600	800	1210000	5302500	1412500	600000	8525000
53	2000	1000		197500	9200000	9640000	0	19037500
54	5000	700		680000	500000	5040000	0	6220000
55	3000	1200		407500	7300000	5760000	0	13467500
56	1500	500		290000	0	7200000	2400000	9890000
57	3000	3300		506000	9760000	0	0	10266000
58	4000	4000		2000000	13550000	0	0	15550000
59	1500	2000		275000	2012500	6000000	0	8287500
60	1000	1100		1355000	3000000	1600000	0	5955000
61	4000	1500		1350000	1500000	0	2000000	4850000
62	500	500		575000	3310000	4950000	0	8835000
63	5000	2500		1875000	9350000	0	0	11225000

Lanjutan Tabel 2

64	2000	4200		630000	4790000	0	0	5420000
65	1000	600	1250	393500	4995000	8400000	0	13788500
66	2000	1800		600000	5595000	8400000	0	14595000
67	1000	0	1750	440000	5240000	2280000	0	7960000
68	5000	2500		1032000	3800000	4950000	12000000	21782000
Rata2				617.978	6.024.574	3.859.213	985.294	11.487.059

Keterangan: analisis data primer (2014)

Remarks: primary data analysis (2014)

**Tabel 3.** Rata-rata pendapatan dan kontribusinya pada pendapatan petani HKm Kulon Progo (hutan produksi dan hutan lindung)**Table 3.** Average of income and contribution to HKm Kulon Progo farmer's income (production and protection forests)

Uraian	HKm HP	HKm HL
I.Rata-rata pendapatan (jt)		
a. Pertanian	4.983.500	6.846.473,68
b. HKm	594.667	636.381,6
c. Non pertanian	2.883.800	4.629.276,32
d. Lain-lain	704.333	1.207.105
e. Total	9.166.300	13.319.236,6
II.Kontribusi pendapatan (%)		
a. Pertanian	54,4	51,4
b. HKm	6,4	4,8
c. Non pertanian	31,5	34,8
d. Lain-lain	7,7	9
e. Total	100	100

Keterangan: Analisis data primer (2014)

Remarks: Primary data analysis (2014)

Berdasarkan rumus perhitungan kemiskinan menurut Sayogyo (1988) maka didapatkan kriteria kemiskinan petani HKm Kulon Progo seperti terlihat pada Tabel 4. Apabila dibandingkan antara petani HKm Hutan Produksi dan petani HKm Hutan Lindung, maka lebih banyak petani yang tergolong miskin di HKm Hutan Produksi. Petani yang masuk kategori miskin sekali dan miskin di HKm hutan produksi mencapai 70%, sedangkan di HKm hutan lindung hanya 47,3%. Hal ini karena matapencaharian petani HKm hutan lindung lebih bervariasi seperti misalnya pendapatan dari penjualan gula, kegiatan wisata, maupun pemanfaatan tanaman bawah tegakan.

Masyarakat memiliki penilaian tersendiri terhadap kemiskinan. Pada lokasi penelitian, dengan melihat dari ukuran luas penguasaan lahan dan pemilikan ternak. Mereka yang punya lahan pertanian milik lebih luas (lebih atau sama dengan satu ha) dan punya banyak ternak (lebih dari dua sapi) dianggap lebih berada dibandingkan dengan yang lainnya. Istilah yang digunakan masyarakat adalah 'kurang' atau melarat untuk menggambarkan kondisi miskin dan cukupan untuk menggambarkan kondisi cukup atau berlebih. Tidak ada yang mengaku 'kaya' walaupun dari segi kepemilikan aset, sudah termasuk berlebih. Tingginya persentase petani HKm Kulon Progo yang masuk kategori miskin sekali dan miskin, menunjukkan indikasi bahwa masyarakat HKm masih

perlu dibantu dalam mengoptimalkan potensi untuk keluar dari kemiskinan.

### Implikasi masalah pengelolaan HKM

Gambaran karakteristik petani, pendapatan, dan kemiskinan petani HKM Kulon Progo menunjukkan adanya beberapa permasalahan terkait masih banyaknya petani yang masuk kategori miskin sekali dan miskin. Permasalahan utama adalah berkurangnya pendapatan dari lahan HKM karena kondisi lahan yang sebagian besar sudah tidak optimum untuk ditanami tanaman pangan (Mustofa 2011). Hasil hutan kayu belum dapat dimanfaatkan oleh petani HKM hutan produksi karena terkendala urusan perizinan. Potensi wisata di areal hutan lindung, masih harus dikembangkan lebih lanjut agar dapat meningkatkan pendapatan.

Sebagian besar lahan HKM Kulon Progo telah mengalami penurunan produktivitas terutama produktivitas tanaman pangan. Sebaliknya, peningkatan produktivitas juga terjadi walaupun dalam bentuk tidak langsung (*intangibile*). Hutan yang tidak lagi gundul, udara yang sejuk, dan munculnya mata air adalah beberapa manfaat *intangibile* dari lahan HKM. Keamanan hutan yang terjaga serta meningkatnya kemampuan petani dalam berorganisasi juga merupakan manfaat *intangibile* yang tidak boleh dilupakan. Manfaat *intangibile* saja tidak cukup bagi masyarakat yang miskin sehingga jalan satu-satunya harus ada alternatif peningkatan pendapatan dengan memfokuskan diri pada potensi yang belum

secara optimal dikembangkan. Potensi yang ada di HKM Kulon Progo, antara lain adalah potensi tanaman empon-empon dan umbi-umbian serta potensi wisata.

Tanaman empon-empon dan umbi-umbian selama ini sudah dibudidayakan oleh petani HKM Kulon Progo (Palmolina 2014). Tanaman empon-empon dijual dalam bentuk irisan tipis dan kering sebagai bahan baku industri jamu lokal. Tanaman umbi-umbian diolah menjadi makanan jadi sehingga meningkatkan nilai tambahnya, contohnya pengolahan garut menjadi emping yang sudah dipasarkan secara lokal. Pengembangan dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan penanaman umbi garut yang lebih merata di setiap kelompok sehingga tersedia stok bahan baku yang cukup. Apabila stok bahan baku tercukupi sehingga produksi emping dapat dilakukan secara berkelanjutan sebaiknya dilakukan promosi sehingga produk makanan dapat dipasarkan ke wilayah yang lebih luas.

Potensi wisata alam merupakan potensi yang sangat tinggi nilainya, yang terdapat pada kelima kelompok HKM hutan lindung. Areal HKM hutan lindung terdapat di wilayah perbukitan yang memiliki potensi udara sejuk serta pemandangan yang indah. Hal ini merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan terutama orang kota yang mulai jenuh dengan gaya hidup kota yang bising. Selain udara sejuk dan pemandangan pedesaan, wisata alam juga dapat diperkaya dengan pertunjukan seni lokal,

**Tabel 4.** Tingkat kemiskinan petani HKM Kulon Progo  
**Table 4.** Poor level of farmers in HKM Kulon Progo

Tingkat Kemiskinan	HKM Hutan Produksi		HKM Hutan Lindung	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Miskin sekali	13	43,3	7	18,4
Miskin	8	26,7	11	28,9
Nyaris miskin	7	23,3	14	36,8
Tidak miskin	2	6,7	6	15,9
Jumlah	30	100	38	100

Keterangan: Analisis data primer (2014)  
Remarks: Primary data analysis (2014)

budaya masyarakat, penyuguhan kuliner khas dan penjualan souvenir yang menonjolkan keunggulan lokal wilayah (Hasiholan 2015). Wisata alam yang berbasis masyarakat tidak hanya dapat memberdayakan penduduk lokal namun juga memperkuat modal manusia dan modal sosial pada lokasi tersebut (Auesriwong et al. 2015). Jika dikelola secara efektif, ekowisata dapat menimbulkan kesadaran masyarakat bahwa kawasan yang dilindungi dapat memberikan manfaat langsung bagi perubahan taraf hidup (Kuuder et al. 2013).

Perubahan dari masyarakat petani hutan menjadi masyarakat desa wisata, membutuhkan proses pembelajaran dan adaptasi tersendiri (Hardika 2011). Ada hal-hal yang harus diperhatikan terutama masalah daya dukung lingkungan di areal wisata mengingat wisata alam berbeda dengan wisata biasa. Masyarakat harus terus diberikan sosialisasi akan pentingnya unsur konservasi pada wisata alam. Jika kelestarian alam diabaikan maka daya tarik wisata alam akan hilang. Oleh sebab itu, pendampingan dari pihak dinas kehutanan maupun LSM tetap diperlukan dalam mengawal pengembangan HKM ke depan.

## Kesimpulan

Petani HKM Kulon Progo rata-rata berusia 53 tahun dan masih termasuk usia produktif. Pendidikan petani relatif rendah, sebagian besar (53%) lulusan SD. Rata-rata jumlah tanggungan keluarga petani adalah 4 orang. Rata-rata luas andil HKM yang digarap petani adalah 2.128,5 m<sup>2</sup> dan rata-rata luas lahan milik adalah 2.947 m<sup>2</sup> sehingga termasuk kategori petani gurem. Sebagian petani (70% di areal hutan produksi dan 47,3% di areal hutan lindung), masuk dalam kategori miskin sekali dan miskin, sehingga masih diperlukan kegiatan pemberdayaan yang lebih tepat dan dapat meningkatkan pendapatan petani. Kontribusi HKM terhadap pendapatan keluarga petani jauh berkurang dari tahun-tahun sebelumnya. Kontribusi Hkm terhadap pendapatan petani HKM Hutan Produksi sebesar 6,4%; sedangkan

kontribusi HKM terhadap pendapatan petani HKM Hutan Lindung adalah sebesar 4,8%. Pengembangan potensi empon-empon, umbi-umbian dan ekowisata diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dari HKM.

Saran yang dapat diberikan penulis terkait pengembangan HKM di Kulon Progo adalah perlunya dukungan terus menerus baik berupa dana, pelatihan pemberdayaan masyarakat maupun dorongan semangat dari pihak Dinas Kehutanan maupun LSM. Sosialisasi HKM juga masih perlu selalu dilakukan khususnya setelah adanya lebih banyak pihak yang terlibat dengan terbukanya akses hutan melalui kegiatan ekowisata.

## Daftar Pustaka

- Afandi WN. 2010. Identifikasi karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Padang Pariaman. Tesis (tidak dipublikasikan). Univeristas Andalas. unand.ac.id/20447/1 Diakses Januari 2017.
- Agunggunanto EY. 2011. Analisis kemiskinan dan pendapatan keluarga nelayan kasus di Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* 1(1):50-58.
- Aji GB, Suryanto J, Yulianti R, Wirati A, Abdurrahim AY, Miranda TI. 2014. Strategi pengurangan kemiskinan di desa-desa sekitar hutan. Pengembangan model PHBM dan HKM. Laporan Penelitian. Pusat Penelitian Kependudukan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta.
- Andini NK, Nilakusmawati DPE, Susilawati M. 2013. Faktor-faktor yang memengaruhi penduduk lanjut usia masih bekerja. *Piramida Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia* 9(1) :44-49.
- Auesriwong A, Nilnoppakun A, Parawech W. 2015. Integrative participatory community based ecotourism at Sangkhom District, Nong Khai Province, Thailand. *Procedia Economics and Finance* 23: 778 – 782.
- Awang SA. 1994. Studi kemiskinan di desa sekitar hutan dan upaya pengentasannya. *Buletin MR* 1: 21-30
- Awang SA. 2004. Dekonstruksi sosial forestry: Reposisi masyarakat dan keadilan lingkungan. BIGRAF Publishing, Yogyakarta
- Awang SA. 2006. Sosiologi pengetahuan deforestasi. Konstruksi sosial dan perlawanan. Debut Press, Yogyakarta.
- Budiartiningih R, Maulida Y, Taryono. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan keluarga petani melalui sektor informal di Desa Kedaburapat, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ekonomi* 18(1):79-93.
- Djamhuri, TL. 2008. Community participation in a social forestry program in Central Java, Indonesia: The effect of

- incentive structure and social capital. *Agroforestry Systems* 74:83-96.
- Ekawati S, Budiningsih K, Sylviani, Suryandari E, Hakim I. 2015. Kajian tinjauan kritis pengelolaan hutan di Pulau Jawa. *Policy Brief*. Vol 9, No. 1 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim, Bogor.
- Galudra G, Buana Y, Khususiyah N. 2010. Mau melangkah ke mana pengelolaan hutan Sesat? Brief No. 09 Policy Analysis Unit. World Agroforestry Center, Bogor.
- Hardika. 2011. Transformasi pola matapencaharian petani: Strategi dan perilaku belajar petani di kawasan transisi dalam mengembangkan kehidupan. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran* 18(1): 90-97
- Hasiholan LB. 2015. Peran enterpreneur batik Semarang dalam mengangkat keunggulan lokal menyambut MEA 2015. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Kontemporer* 1(1):42-54.
- Kuuder CJW, Bagson E, Aalangdong IO. 2013. Livelihood enhancement through ecotourism: A case of Mognori ecovillage near Mole National Park, Damongo, Ghana. *International Journal of Business and Social Science* 4(4): 128-137.
- Limberg G, Iwan R, Wollenberg E, Moeliono M. 2006. Peluang dan tantangan untuk mengembangkan hutan kemasyarakatan, pengalaman dari Malinau. *Governance Brief* No.15b. CIFOR, Bogor.
- Manyamsari I, Mujiburrahmad. 2014. Karakteristik petani dan hubungannya dengan kompetensi petani lahan sempit. *Agrisep* 15(2): 58-74.
- Maryudi A, Devkota RR, Schusser C, Yufanyi C, Salla M, Aurenhammer H, Rotchanaphatharawit R, Krott M. 2012. Back to basics: Considerations in evaluating the outcomes of community forestry. *Forest Policy and Economics* 14: 1-5.
- Mubyarto. 1979. Pengantar ekonomi pertanian. LP3ES. Jakarta.
- Mulyadin RM, Surati, Ariawan K. 2016. Kajian hutan kemasyarakatan sebagai sumber pendapatan: Kasus di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 13(1):13-23.
- Mustofa MS. 2011. Perilaku masyarakat desa hutan dalam memanfaatkan lahan di bawah tegakan. *Jurnal Komunitas* 3(1): 1-11
- Nandini R. 2013. Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada hutan produksi dan hutan Lindung di Pulau Lombok. *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman* 10(1): 43-55
- Nurhasikin. 2013. Penduduk usia produktif dan ketenagakerjaan. <http://kepri.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=144>. Diakses Januari 2015.
- Palmolina M. 2014. Peranan hasil hutan bukan kayu dalam pembangunan hutan kemasyarakatan di Perbukitan Menoreh (Kasus di Desa Hargorejo, Kokap, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta). *Jurnal Ilmu Kehutanan* 8(2): 120-127
- Rochmayanto Y, Sasmita T. 2005. Peluang dan hambatan pengembangan HKm di Koto Panjang, Riau : Pendekatan sosiologis. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 2(3):279-289.
- Saadah S. 1990. Masyarakat petani, matapencaharian sambilan dan kesempatan kerja di Kelurahan Cakung Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
- Sanudin, Awang SA, Sadono R, Purwanto RH. 2016. Perkembangan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23(6): 276-283.
- Sayogyo. 1988. Garis kemiskinan dan ukuran tingkat kesejahteraan penduduk. Lokakarya Pembinaan dan Pengembangan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Menyongsong Masa Depan Jurusan Ekonomi Pertanian dan Partisipasinya dalam Pembangunan. Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Sepsaji D, Fuadi F. 2004. HKm meretas jalan. Konsorsium Pengembangan Hutan Kemasyarakatan (KPHKm) Kabupaten Gunungkidul. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Storey G, Marzuki A. 2002. Survei sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan (Contoh untuk perencanaan dan pelaksanaan di tingkat operasional) Berau Forest Management Project. Departemen Kehutanan. Jakarta.
- Suratiyah K. 2001. Pekerjaan luar usahatani (Kasus rumah tangga petani gurem di Jawa). *Agro Ekonomi* 8(2): 65-72
- Suyanto S, Khususiyah N. 2006. Imbalan jasa lingkungan untuk pengentasan kemiskinan. *Jurnal Agro Ekonomi* 24(1):95-113.
- Wollenberg E, Belcher B, Sheil D, Dewi S, Moeliono M. 2004. Mengapa kawasan hutan penting bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia? *Governance Brief*. CIFOR, Bogor.